



**BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 114 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA KECAMATAN WANARAJA TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Kecamatan Wanaraja Tahun 2022;
  - b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Wanaraja Tahun 2022;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 232);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1);

18. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);
19. Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 38);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN WANARAJA TAHUN 2022.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2022, yang selanjutnya disebut Renja Kecamatan Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

## **BAB II**

### **SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN**

#### **Pasal 2**

Renja Kecamatan Tahun 2022 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2022 dan hasil evaluasi Renja Kecamatan tahun lalu.

**Pasal 3**

(1) Renja Kecamatan Tahun 2022 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN

BAB V : PENUTUP

(2) Renja Kecamatan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 4**

Renja Kecamatan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Kecamatan Tahun Anggaran 2022.

**BAB III**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 19 - 7 - 2021**

**B U P A T I G A R U T,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 19 - 7 - 2021**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

**t t d**

**N U R D I N Y A N A**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2021 NOMOR 114**

Mengetahui  
Sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH,  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,  
u.b.

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN BUPATI GARUT**  
**NOMOR 114 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**RENCANA KERJA KECAMATAN**  
**WANARAJA TAHUN 2022**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam **“Percepatan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur Serta Penguatan Pelayanan Publik Untuk Kesejahteraan Masyarakat”**.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor, 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk itu, pemerintah daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk 5 tahun, Renstra SKPD

untuk 5 tahun, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun dan Rencana Kerja SKPD untuk 1 tahun

Kecamatan Wanaraja sebagai salah satu lembaga dalam sistem pemerintahan daerah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan dan penganggaran pembangunan di Kecamatan.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Garut, yaitu “**Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera**”, serta Misi ke 2 RPJMD Tahun 2019-2024 yaitu “Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih”, Kecamatan Wanaraja telah menyusun dokumen perencanaan lima tahunan SKPD yaitu Rencana Strategis yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip *Good governance* yang memuat prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, *rule of law profesionalisme*, efektivitas dan efisiensi.

Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 223 - 226 Kecamatan menempati kedudukan yang strategis karena diberikan kewenangan oleh Bupati/Walikota untuk melaksanakan sebagian Otonomi Daerah (bersifat delegatif) dan pengembalian tugas khusus pemerintahan (bersifat atributif).

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati, juga menyelenggarakan tugas Umum *Pemerintahan* yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Mengingat semakin kompleks tugas camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan , evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.

Perencanaan yang disusun secara berjenjang mulai tingkat Desa dan kelurahan lebih lanjut menjadi input yang berharga bagi Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan dan



sekaligus menggambarkan utuhnya rangkaian Sistem Perencanaan<sup>1</sup> dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya berdasarkan rencana strategis tersebut diimplementasikan melalui tahapan-tahapan perencanaan kegiatan atau dengan kata lain dengan menyusun Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Kecamatan Wanaraja tahun 2022.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Wanaraja Tahun 2022 antara lain :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700 );
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495 );
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816 );
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725 );
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk kegiatan tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
16. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah);
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 No-

- mor 8 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45 );
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut ( Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2005 Nomor 15 );
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Garut ( Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 22 Seri E );
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 14 );
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 34 );
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005 – 2025 ( Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4 );
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut;
  25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1 );
  26. Peratutan Bupati Garut Nomor 106 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
  27. Peratutan Bupati Garut Nomor 107 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kecamatan;

28. Peraturan Bupati Garut Nomor 254 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Garut Nomor 102 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat ( Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 11 );
29. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27);
30. Peraturan Bupati Garut Nomor 76 tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 76).
31. Keputusan Camat Wanaraja Nomor : 050/Kep. - Kec/2021 tentang tim penyusun rencana kerja ( renja ) Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut Tahun 2022.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud disusunnya Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Wanaraja Tahun 2022 adalah memberikan arahan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Wanaraja guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Garut maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

#### **1.3.2 Tujuan**

Adapun tujuan disusunnya Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Wanaraja Tahun 2022 adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perencanaan, pelaksanaan tugas peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
2. Memberikan kemudahan dalam melakukan sinkronisasi, dan sinergitas antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Garut khususnya Kecamatan Wanaraja;
3. Membuat acuan perencanaan dan penganggaran yang memuat penjabaran Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat sesuai dengan pendelegasian kewenangan dari Bupati.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Tahunan SKPD sebagai implementasi dari Rencana Strategis SKPD Kecamatan Wanaraja yang berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Garut yang merupakan bagian yang terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Garut untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.

Adapun sistematika yang digunakan sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
  - 1.3.1 Maksud
  - 1.3.2. Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN SEBELUMNYA**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Rencana Kerja Kecamatan Wanaraja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah/PD untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan dan penganggaran tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Kecamatan Wanaraja. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Wanaraja ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Wanaraja selama tahun 2020 dan tahun berjalan 2021 serta perkiraan target anggaran Tahun 2022

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Wanaraja 2020 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2020 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Perangkat Daerah Kecamatan Wanaraja dalam pelaksanaan Renja



2020 terdapat 4 (Empat) Program dan 4 (Empat) Kegiatan yang target kinerja hasil/keluaran tidak memenuhi, antara lain :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari kegiatan :
  - Rapat-rapat Konsultasi ke Luar Daerah
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari kegiatan :
  - Pengadaan Pakaian Olahraga
- Program Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD terdiri dari kegiatan :
  - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan terdiri dari kegiatan :
  - Penyelenggaraan Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga

2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Perangkat Daerah Kecamatan Wanaraja dalam pelaksanaan Renja 2020 Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran, antara lain :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran prosentase realisasi keuangan 98,24% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 170.467.100,00 terealisasi Rp. 167.474.652,00 terdiri dari :
  - Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik prosentase realisasi keuangan 77,22% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 9.600.000,00 terealisasi Rp. 7.412.752,00
  - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaran Dinas/Operasional prosentase realisasi keuangan 80,64 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 3.850.000,00 terealisasi Rp. 3.104.800,00

- Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 22.899.390,00 terealisasi Rp. 22.899.390,00
  - Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja prosentase keuangan 100 % dengan pagu anggaran Rp. 5.500.000,00 terealisasi Rp. 5.500.000,00
  - Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor prosentase keuangan 100 % dengan pagu anggaran 48.392.600,00 terealisasi Rp. 48.392.600,00
  - Kegiatan Penyediaan Barang dan Cetak dan Penggandaan prosentase keuangan 100 % dengan pagu Rp. 13.994.250,00 terealisasi Rp. 13.994.250,00
  - Kegiatan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor prosentase keuangan 100% dengan pagu Rp. 8.970.860,00 terealisasi Rp. 8.970.860,00
  - Kegiatan Peralatan Rumah Tangga prosentase keuangan 100% dengan pagu Rp. 4.000.000,00 terealisasi Rp. 4.000.000,00
  - Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman prosentase keuangan 100% dengan pagu Rp. 20.800.000,00 terealisasi Rp. 20.800.000,00
  - Kegiatan Rapat-Rapat Pembinaan ke dalam daerah prosentase keuangan 100 % dengan pagu Rp. 32.460.000,00 terealisasi Rp. 32.460.000,00
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur prosentase realisasi keuangan 97.85 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 180.028.100,00 terealisasi Rp.176.149.800,00 terdiri dari :
- Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasionalr prosentase realisasi keuangan 96,91

% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 72.000.000,00,- terealisasi Rp. 69.771.900,00

- Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor prosentase realisasi keuangan 96 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 25.000.000,00 terealisasi Rp. 24.000.000,00
  - Kegiatan Pengadaan Meubelair prosentase realisasi keuangan 98,45 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 42.000.000,00 terealisasi Rp. 41.350.000,00
  - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 16.820.100,00 terealisasi Rp. 16.820.100,00
  - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala kendaraan Dinas/Operasional prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 24.208.000,00 terealisasi Rp. 24.208.000,00
- c. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 187.072.500,00 terealisasi Rp. 187.072.500,00 terdiri dari :
- Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan PBB Tingkat Kecamatan prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 9.280.000, 00 terealisasi Rp. 9.280.000,00
  - Kegiatan Monitoring Proyek Pembangunan prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp.4.830.000,00 terealisasi Rp. 4.830.000,00
  - Kegiatan Monitoring dan Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 12.115.000,00 terealisasi Rp.

12.115.000,00

- Kegiatan Pengelolaan Sampah prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 125.000.000,00 terealisasi Rp. 125.000.000,00
- Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Karangtaruna prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp.8.607.300,00 terealisasi Rp. 8.607.300,00
- Kegiatan Penyelenggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 6.185.200,00 terealisasi Rp. 6.185.200,00
- Kegiatan Pembinaan Unit Kerja Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 4.250.000,00 terealisasi Rp. 4,250.000,00

d. Program Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 39.344.950,00 terealisasi Rp. 39.944.950,00,- terdiri dari :

- Kegiatan Penyelenggaran Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 39.344.950,00 terealisasi Rp. 39.344.950,00

Pelaksanaan program kerja pada tahun 2020 dengan anggaran sebesar Rp. 2.124.884.242,00 terealisasi Rp. 2.039.454.404,00 dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosentase
1	Belanja Pegawai	1.547.971.592	1.469.412.502	98,24
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	170.467.100	167.474.652	98,24
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	180.028.100	176.149.800	97.85
4	Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	187.072.500	187.072.500	100
5	Program Pelayanan Administrasi Terpadu ( PATEN)	39.344.950	39.344.950	100
<b>Jumlah</b>		<b>2.124.884.242</b>	<b>2.039.454.404</b>	<b>95,98</b>

- 3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada tahun anggaran 2020 tidak ada realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dalam Renja 2021 Perangkat Daerah Kecamatan Wanaraja
- 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, antara lain :
- a. Belum adanya koordinasi yang baik dari perangkat daerah terkait pemeliharaan rumah dinas camat serta pembinaan RT/RW dan lembaga kemasyarakatan;
  - b. Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan baik kecamatan/kelurahan;
  - c. Sering terjadinya efisiensi anggaran terkait pada pertengahan tahun anggaran berjalan, sehingga pagu anggaran yang sudah sesuai rancangan di Kecamatan/Kelurahan tidak bisa direalisasikan/kembali ke kas daerah;
  - d. Belum adanya penetapan program/kegiatan yang pasti baik di Kecamatan/Kelurahan

5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Wanaraja adalah sebagai berikut :

b. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Wanaraja tahun 2020 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Wanaraja pada umumnya.

c. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Wanaraja berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan kecamatan Wanaraja.

6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut antara lain :

a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan.

b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan/Kelurahan dan Desa

Evaluasi Program/ Kegiatan Renja SKPD Kecamatan Wanaraja selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan perbandingan realisasi Renja SKPD tahun sebelumnya serta target kinerja kegiatan Renja tahun berjalan dan tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel T-C.29 sebagai berikut :



**Tabel T-C.29**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan**  
**Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2020**

**Nama SKPD : Kecamatan Wanaraja**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu ( n-2 )			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2020 ( n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2020 ( n-2 )	Realisasi Renja SKPD tahun 2020 (n-2 )	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2021 ( tahun n-1 )	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11= ( 10/4 )
<b>1.20.1.20.1 9.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<sup>2</sup>					
1.20.1.20.19.01.002	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran jasa komunikasi air dan listrik	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	48 bulan	80 %
7.01.7.01.10.01.004.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pembayaran STNK Pajak Kendaraan Roda 4 dan Roda 2	(9 Unit) 45 Unit	18 Unit	9 Unit	9 Unit	100 %	9 Unit	36 Unit	80 %
1.20.1.20.19.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan dan peralatan kebersihan	120 Orang	48 Orang	24 Orang	24 Orang	100 %	24 orang	96 Orang	80 %
7.01.7.01.10.01.007	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah paket jasa perbaikan peralatan kerja	5 Paket	2 Paket	1 Paket	1 Paket	100 %	1 Paket	4 Paket	80 %



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu ( n-2 )			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2020 ( n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2020 ( n-2 )	Realisasi Renja SKPD tahun 2020 (n-2 )	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2021 ( tahun n-1 )	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11= ( 10/4 )
1.20.1.20.19.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah paket alat tulis kantor	5 Paket	2 Paket	1 Paket	1 Paket	100 %	1 Paket	4 Paket	80 %
1.20.1.20.19.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket cetak, penggandaan/foto copi	5 Paket	2 Paket	1 Paket	1 Paket	100 %	1 Paket	4 Paket	80 %
1.20.1.20.19.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah paket penyediaan komponen instalasi listrik	5 Paket	2 Paket	1 Paket	1 Paket	100 %	1 Paket	4 Paket	80 %
1.20.1.20.19.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan dan bahan pembersih kecamatan	5 Paket	2 Paket	1 Paket	1 Paket	100 %	1 Paket	4 Paket	80 %
1.20.1.20.19.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah eksemplar bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	360 Ekspl	144 Ekspl	72 Ekspl	72 Ekspl	100 %	72 Ekspl	288 Ekspl	80 %
1.20.1.20.19.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	3.000 Orang	1.200 Org	600 Org	600 Org	100 %	600 Org	2.400 Org	80 %
1.20.1.20.19.01.021	Rapat-rapat Koordinasi dan Pembinaan ke Dalam Daerah	Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan pembinaan kedalam daerah	1.080 keg	432 keg	216 keg	216 keg	100 %	216 keg	864 keg	80 %

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu ( n-2 )			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2020 ( n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2020 ( n-2 )	Realisasi Renja SKPD tahun 2020 (n-2 )	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2021 ( tahun n-1 )	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11= ( 10/4 )
<b>7.01.7.01.1 0.02.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>									
1.20.1.20.19.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah paket peralatan gedung kantor	5 paket	2 paket	1 paket	1 paket	100 %	1 paket	4 paket	80 %

1.20.1.20.19.02.010	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah unit Kendaraan Dinas/operasional	3 Unit	3 Unit	-	-	-	-	3 paket	100 %
1.20.1.20.19.02.021	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah paket pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	5 paket	2 paket	1 paket	1 paket	100 %	1 paket	4 paket	80 %
1.20.1.20.19.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor Kecamatan	5 paket	2 paket	1 paket	1 paket	100 %	1 paket	4 paket	80 %
1.20.1.20.19.02.024	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah paket untuk pemeliharaan rutin berkala, servis, suku cadang dan pelumas	5 paket	2 paket	1 paket	1 paket	100 %	1 paket	4 paket	80 %
1.20.1.20.19.02.025	Penataan Halaman gedung kantor	Jumlah Keg. Penataan Halaman gedung kantor	5 Keg	2 Keg	1 keg	1 keg	100 %	1 kwg	4 Keg	80 %
1.20.1.20.19.02.010	Pengadaan mebeulair	Jumlah paket pengadaan mebelair	5 paket	2 paket	1 paket	1 paket	100 %	1 paket	4 paket	80 %
1.20.1.20.19.02.066	Pengadaan alat berat	Jumlah unit pengadaan alat berat	2 Unit	2 unit	-	-	-	-	2 Unit	100 %
7.01.7.01.10.02.021.	Pengadaan Aplikasi/Papan Visual Elektronik	Jumlah paket pengadaan Aplikasi/Papan Visual Elektronik	1 paket	1 paket	-	-	-	-	1 paket	100 %
7.01.7.01.10.02.034.	Pengadaan Tanah Kantor Kecamatan, Polsek dan Koramil	Jumlah pengadaan Tanah Kantor Kecamatan, Polsek dan Koramil	1 lokasi	1 lokasi	-	-	-	-	1 lokasi	100 %
7.01.7.01.10.02.035.	Pengadaan Bangunan Kantor Kecamatan,	Jumlah perkantoran yang terbangun	1 Unit	1 unit	-	-	-	-	1 Unit	100 %
<b>1.20.1.20.19.03</b>	<b>Peningkatan Disiplin Aparatur</b>									

1.20.1.20.19.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	Jumlah kain seragam untuk pengadaan pakaian dinas	30 stel	30 stel	-	-	-	-	30 stel	100 %
1.20.1.20.19.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	Jumlah kain batik untuk pengadaan pakaian hari hari tertentu	85 stel	85 stel	-	-	-	-	85 stel	100 %
	Pengadaan Mesin kartu absensi	Jumlah Mesin kartu absensi	1 Unit	-	1 Unit	1 Unit	100 %	-	1 Unit	100 %
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>									
	Pelatihan dan Bimbingan Teknis SIPKD	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat/Bintek	10 Org	4 Org	2 Org	2 Org	100 %	2 org	8 Org	80 %
<b>7.01.7.01.1 0.06</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>									
1.20.1.20.19.25	Pengumpulan data dan penyusunan pelaporan SKPD	Jumlah dokumen laporan	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	4 Dokumen	80 %
<b>7.01.7.01.1 0.79</b>	<b>Program Penunjang Kegiatan Kecamatan</b>									
1.20.1.20.19.79.01	Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara/acara lainnya	Jumlah kegiatan penyelenggaraan Hari Besar Nasional dan Upacara/Acara lainnya	35 kali	14 kali	7 kali	7 kali	100 %	7 kali	28 kali	80 %
7.01.7.01.10.79.002	Penyelenggaraan kegiatan TP PKK tingkat kecamatan	Jumlah Keg pembinaan TP PKK	10 kali	4 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	8 kali	80 %
<b>7.01.7.01.1 0.82</b>	<b>Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan</b>									

1.20.1.20. 19.82.01	Penyelenggaraan administrasi terpadu tingkat kecamatan (PATEN)	Jumlah kegiatan survei kepuasan masyarakat	5 kali	2 kali	1 kali	1 kali	100 %	1 kali	4 kali	80 %
1.20.1.20. 19.82.03	Penyusunan RPTK Kecamatan	Jumlah Laporan RPTK Kecamatan	5 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	4 dokumen	80 %
1.20.1.20. 19.82.07	Fasilitasi dan Koordinasi unit kerja Pemerintah dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan, Pemuda dan Olahraga	Jumlah pembinaan lembaga kemasyarakatan, Pemuda dan Olahraga yang terbina	5 Kali	2 kali	1 kali	1 kali	100 %	1 kali	4 kali	80 %
1.20.1.20. 19.82.04	Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah peserta sosialisasi ketentraman dan ketertiban umum	250 Orang	100 orang	50 orang	50 orang	100 %	50 orang	200 orang	80 %
	Fasilitasi, Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda/Perkada	Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda/Perkada	5 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %	1 Kegiatan	4 Kegiatan	80 %
1.20.1.20. 19.82.09	Pembinaan teknis pelaksanaan perlombaan desa/kelurahan tingkat kecamatan	Jumlah desa yang mewakili Lomba Desa Tingkat Kabupaten	5 Desa/5 Kali keg	2 Desa/2 Kali keg	1 Desa/1 Kali keg	1 Desa/1 Kali keg	100 %	1 Desa/1 Kali keg	4 Desa/4 Kali keg	80 %
1.20.1.20. 19.82.	Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa	Jumlah aparatur Desa yang terbina dalam tupoksi Desa	250 orang /60 bulan	100 orang /12 bulan	50 orang /12 bulan	50 orang /12 bulan	100 %	50 orang /12 bulan	200 orang /12 bulan	80 %
1.20.1.20. 19.82.15	Fasilitasi pembinaan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa	Jumlah aparatur desa yang berkepetensi dalam pengelolaan keuangan dan aset desa	250 orang /60 bulan	100 orang /12 bulan	50 orang /12 bulan	50 orang /12 bulan	100 %	50 orang /12 bulan	200 orang /12 bulan	80 %
7.01.7.01.10. 82.019.	Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan PBB Tingkat Kecamatan	Jumlah kolektor dan apratur desa yang mengikuti pembinaan PBB	250 orang /60 bulan	100 orang /12 bulan	50 orang /12 bulan	50 orang /12 bulan	100 %	50 orang /12 bulan	200 orang /12 bulan	80 %
7.01.7.01.10. 82.056	Monitoring pelaksanaan kegiatan raskin/ Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan Raskin	250 orang /60 bulan	100 orang /12 bulan	50 orang /12 bulan	50 orang /12 bulan	100 %	50 orang /12 bulan	200 orang /12 bulan	80 %

**Tabel T-C.29**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan**  
**Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2022**

**Nama SKPD : Kecamatan Wanaraja**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu ( n-2 )			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2022 ( n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2022 ( n-2 )	Realisasi Renja SKPD tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2022 ( tahun n-1 )	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11= ( 10/4 )
7.01.7.01.10.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>				3					
	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>									
7.01.7.01.10.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Jumlah Dokumen Desain Engineering (DED) Gedung	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	5 Dokumen	100 %
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>									
7.01.7.01.10.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	60 Bulan	36 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 Bulan	60 Bulan	100 %

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu ( n-2 )			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2022 ( n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2022 ( n-2 )	Realisasi Renja SKPD tahun 2022 (n-2 )	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2022 ( tahun n-1 )	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11= ( 10/4 )
7.01.7.01.10.01.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	60 Bulan	36 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 Bulan	60 Bulan	100 %
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>									
7.01.7.01.10.01.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pengiriman ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi	15 Orang	9 Orang	3 Orang	3 Orang	100 %	3 Orang	15 Orang	100 %
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>									
7.01.7.01.10.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah item penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan Bangunan Kantor	40 Item	24 Item	8 Item	8 Item	100 %	8 Item	40 Item	100 %
7.01.7.01.10.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	20 Jenis	14 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	100 %	4 Jenis	20 Jenis	100 %
7.01.7.01.10.01.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah item peralatan rumah tangga yang memadai	75 Item	45 Item	15 Item	15 Item	100 %	15 Item	75 Item	100 %

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu ( n-2 )			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2022 ( n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2022 ( n-2 )	Realisasi Renja SKPD tahun 2022 (n-2 )	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2022 ( tahun n-1 )	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11= ( 10/4 )
7.01.7.01.10.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10 Jenis	6 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100 %	2 Jenis	10 Jenis	100 %
7.01.7.01.10.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah exemplar penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.320 Exemplar	2.592 Exemplar	864 Exemplar	864 Exemplar	100 %	864 Exemplar	4.320 Exemplar	100 %
7.01.7.01.10.01.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah pelaksanaan fasilitasi kunjungan tamu	560 Orang	336 Orang	112 Orang	112 Orang	100 %	112 Orang	560 Orang	100 %
7.01.7.01.10.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.730 Kali	1.038 Kali	346 Kali	346 Kali	100 %	346 Kali	1.730 Kali	100 %
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									
7.01.7.01.10.01.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah item Pengadaan Mebel	5 Item	3 Item	1 Item	1 Item	100 %	1 Item	5 Item	100 %
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah</b>									



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu ( n-2 )			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2022 ( n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2022 ( n-2 )	Realisasi Renja SKPD tahun 2022 (n-2 )	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2022 ( tahun n-1 )	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11= ( 10/4 )
7.01.7.01.10.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	36 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 Bulan	60 Bulan	100 %
7.01.7.01.10.01.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah item Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpelihara	10 Item	6 Item	2 Item	2 Item	100 %	2 Item	10 Item	100 %
7.01.7.01.10.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis Jasa Pelayanan Umum Kantor	10 Jenis	6 Item	2 Item	2 Item	100 %	2 Item	10 Item	100 %
	<b>Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah</b>									
7.01.7.01.10.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Pembayaran STNK dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan	45 Unit	15 Unit	5 Unit	5 Unit	100 %	5 Unit	45 Unit	100 %
7.01.7.01.10.01.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan/ Gedung yang terpelihara (Rumah Dinas dan Gedung Kantor)	1 Bangunan	1 Bangunan	-	-	-	-	-	100 %
<b>7.01.7.01.10.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>									

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu ( n-2 )			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2022 ( n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2022 ( n-2 )	Realisasi Renja SKPD tahun 2022 (n-2 )	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2022 ( tahun n-1 )	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11= ( 10/4 )
	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>									
7.01.7.01.10.02.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	60 Bulan	36 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 Bulan	60 Bulan	100 %
	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan</b>									
7.01.7.01.10.02.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis pelayanan di Tingkat Kecamatan	30 Jenis	18 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	100 %	6 Jenis	30 Jenis	100 %
<b>7.01.7.01.10.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>									
	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>									
7.01.7.01.10.03.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Dokumen RPTK	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	5 Dokumen	100 %

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu ( n-2 )			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2022 ( n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2022 ( n-2 )	Realisasi Renja SKPD tahun 2022 (n-2 )	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2022 ( tahun n-1 )	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11= ( 10/4 )
	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>									
7.01.7.01.10.03.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Peserta Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	150 Orang	90 Orang	30 Orang	30 Orang	100 %	30 Orang	150 Orang	100 %
<b>7.01.7.01.10.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>									
	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>									
7.01.7.01.10.04.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Verrtikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	150 Orang	90 Orang	30 Orang	30 Orang	100 %	30 Orang	150 Orang	100 %
7.01.7.01.10.04.01.02	Harmonisasi hubungan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kafilah/ Jumlah Cabang Golongan yang diikuti	750 Orang	450 Orang	150 Orang	150 Orang	100 %	150 Orang	750 Orang	100 %
<b>7.01.7.01.10.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>									

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu ( n-2 )			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2022 ( n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2022 ( n-2 )	Realisasi Renja SKPD tahun 2022 (n-2 )	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2022 ( tahun n-1 )	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11= ( 10/4 )
	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>									
7.01.7.01.10.06.01.04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pelaksanaan pembinaan/ razia Tingkat Kecamatan	250 Orang	150 Orang	50 Orang	50 Orang	100 %	50 Orang	250 Orang	100 %

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Wanaraja sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Untuk lebih jelasnya dapat disajikan tabel T-C.30 sebagai berikut :

**Tabel T-C.30**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut**

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Ca- paian		Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai SKM	-	-	80	80,5	90	90,5	100	81,58	82,78	90	
2	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	-	-	80	80,5	90	90,5	100	-	-	90	
3	Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	-	-	80 %	80,5 %	90 %	90,5 %	100 %	-	-	90 %	
4	Nilai/ Predikat SAKIP	-	-	C	CC	CC	B	BB	C	B	B	

### **2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat SKPD**

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Wanaraja bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

#### **1) Pemanfaatan**

Peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah.

Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Garut;

#### **2) Optimalisasi**

Partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility ( CSR )*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

#### **3) Pelayanan Prima.**

Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Garut yang menyelenggarakan pelayanan publik,

maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

#### **4) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Penambahan Kuantitas Aparatur.**

Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur yang profesional dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya untuk menunjang dalam pelaksanaan Pelayanan Prima terhadap masyarakat.

#### **2.4.Review terhadap RKPD**

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Wanaraja serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupa-



kan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Wanaraja berdasarkan RKPD Kabupaten Garut sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Garut yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Wanaraja.

Untuk melaksanakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, anggaran tahun 2022 yang diusulkan Kecamatan Wanaraja sebesar **Rp. 4.794.537.402,00** dengan realisasi anggaran **Rp. 3.294.071.452,00** persentase realisasi anggaran sebesar 68,70 %.

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Wanaraja diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan.

- a. Perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan. Dalam RKPD 2022 Kecamatan Wanaraja mengusulkan 6 Program dengan 13 Kegiatan.
- b. Penjelasan mengenai temuan dan catatan penting. Program dan kegiatan pada Kecamatan Wanaraja mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Garut.

Dibawah ini kami sampaikan lampiran Tabel T-C.31 sebagai berikut :

**Tabel T-C.31**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022**  
**Kabupaten Garut**

Nama SKPD : Kecamatan Wanaraja

Lembar 1 dari 4

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	Kecamatan Wanaraja	<b>Prosentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan</b>	100%	4.188.833.252	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	Kecamatan Wanaraja	<b>Prosentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan</b>	100%	3.294.071.452	
	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				16.500.000	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				16.500.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 dokumen	16.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 dokumen	16.500.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD					
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				1.916.040.190	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				1.916.040.190	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	1.908.890.190	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	1.908.890.190	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Bulan	7.150.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	7.150.000	

	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>1.402.820.925</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					<b>190.940.000</b>
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Item Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	181.390.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Item Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	18.139.000	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	1.070.976.445	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	60.000.000	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Item Peralatan Rumah Tangga Yang Memadai	12 bulan	7.089.200	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Item Peralatan Rumah Tangga Yang Memadai	12 bulan	7.089.200	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Jenis Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	18.520.700	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Jenis Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	15.141.800	
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 bulan	81.400.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 bulan	61.600.000	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	48.444.500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	28.970.000	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>476.875.960</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>127.394.400</b>
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5 Unit	455.483.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Wanaraja			112.078.000	

2	Pengadaan Mebel	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Item Pengadaan Mebel	5 Jenis	21.442.960	Pengadaan Mebel	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Item Pengadaan Mebel	5 Jenis	15.316.400	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>326.743.165</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>50.582.812</b>	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telpn dan Internet	12 Bulan	163.375.345	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telpn dan Internet	12 Bulan	16.334.412	
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Item Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Terpelihara	12 Bulan	143.440.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Item Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Terpelihara	12 Bulan	14.330.000	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Petugas Kebersihan Kantor	12 Bulan	19.927.820	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Petugas Kebersihan Kantor	12 Bulan	19.918.400	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>48.873.010</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>149.712.150</b>	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Pembayaran STNK Pajak Kendaraan Roda 4 dan Roda 2	12 Bulan	20.899.010	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Pembayaran STNK Pajak Kendaraan Roda 4 dan Roda 2	12 Bulan	20.738.500	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Lapangan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Pembayaran STNK Pajak Kendaraan Roda 4 dan Roda 2	12 Bulan	28.974.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Lapangan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Pembayaran STNK Pajak Kendaraan Roda 4 dan Roda 2	12 Bulan	28.973.650	
3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Rehabilitasi			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Bangunan/ Gedung Yang Terpelihara (Rumah Dinas dan Gedung Kantor)	1 Unit	100.000.000	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Kecamatan Wanaraja</b>	<b>Prosentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan</b>		<b>199.225.440</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Kecamatan Wanaraja</b>	<b>Prosentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan</b>		<b>170.000.000</b>	

	RAH DAN PELAYANAN PUBLIK		Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Dilaksanakan oleh Kecamatan			RAH DAN PELAYANAN PUBLIK		Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Dilaksanakan oleh Kecamatan			
	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>				<b>19.514.040</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>					<b>170.000.000</b>
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Pelaksanaan kegiatan Bansos,keagamaan dan olahraga	12 Bulan	19.514.040	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Pelaksanaan kegiatan Bansos,keagamaan dan olahraga	12 Bulan	170.000.000	
	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan</b>				<b>179.711.400</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan</b>					<b>174.211.400</b>
1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Pelaksanaan PATEN	12 Bulan	179.711.400	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Pelaksanaan PATEN	12 Bulan	174.211.400	
<b>3</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Kecamatan Wanaraja</b>	<b>Prosentase Masyarakat Desa/ Kelurahan Yang Dapat Diberdayakan</b>		<b>53.203.480</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Kecamatan Wanaraja</b>	<b>Prosentase Masyarakat Desa/ Kelurahan Yang Dapat Diberdayakan</b>			<b>26.380.100</b>
	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>				<b>36.823.160</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>					<b>10.000.000</b>
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Dokumen RPTK Tingkat Desa	1 Dokumen	36.823.160	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Dokumen RPTK Tingkat Desa	1 Dokumen	10.000.000	
	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>				<b>16.380.230</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>					<b>16.380.100</b>
1	Peningkatan Kapasitas	Kecamatan	Jumlah Laporan	12 Bulan	16.380.320	Peningkatan Kapasitas	Kecamatan	Jumlah Laporan	12 Bulan	16.380.100	

	Lembaga Kemasyarakatan	Wanaraja	Pemberdayaan Lembaga			Lembaga Kemasyarakatan	Wanaraja	Pemberdayaan Lembaga			
4	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Kecamatan Wanaraja</b>	<b>Prosentase Peningkatan Perencanaan Gangguan Tran-tibum</b>		133.275.230	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Kecamatan Wanaraja</b>	<b>Prosentase Peningkatan Perencanaan Gangguan Tran-tibum</b>			127.170.000
	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>				133.275.230	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>					127.170.000
1	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Kegiatan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas dengan TNI/POLRI	12 Bulan	78.235.080	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Kegiatan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas dengan TNI/POLRI	12 Bulan		72.129.900
2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Kegiatan Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Bulan	55.040.100	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Kegiatan Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Bulan		55.040.100
5	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Kecamatan Wanaraja</b>	<b>Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilimpahkan Kepada Camat</b>		220.000.000	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Kecamatan Wanaraja</b>	<b>Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilimpahkan Kepada Camat</b>			270.000.000
	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Uum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>				220.000.000	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Uum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>					270.000.000
1	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Wanaraja	Jumlah kegiatan fasilitasi koordinasi dan pembinaan			Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Wanaraja				50.000.000
2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Rapat Forum Koordinasi Pimpinan di Keca-	12 Bulan	220.000.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Rapat Forum Koordinasi Pimpinan di Keca-	12 Bulan		220.000.000

			matan					matan			
<b>6</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Kecamatan Wanaraja</b>	<b>Prosentase Desa Berkinerja Baik</b>		<b>75.140.400</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Kecamatan Wanaraja</b>	<b>Prosentase Desa Berkinerja Baik</b>		<b>75.140.400</b>	
	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>				<b>75.140.400</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>				<b>75.140.400</b>	
1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi	36 Kali	25.140.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi	36 Kali	25.140.000	
2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1 Tahun	25.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1 Tahun	25.000.000	
3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Dokumen RPTK	1 Dokumen	25.000.000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Dokumen RPTK	1 Dokumen	25.000.000	
<b>JUMLAH</b>					<b>4.794.537.402</b>						<b>3.294.071.452</b>

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Usulan program dan kegiatan masyarakat yang telah diterima oleh Pemerintah Kecamatan Wanaraja melalui Musrenbang Tingkat Kecamatan Wanaraja mengacu kepada program prioritas daerah, terdiri dari Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Penurunan Angka Kemiskinan dan Ketimpangan, Peningkatan Kemandirian Ekonomi Lokal, Peningkatan Infrastruktur Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur. Semua usulan tersebut telah kami adopsi dan kami usulkan ke Pemerintah Kabupaten Garut melalui Musrenbang Tingkat Kabupaten Garut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :



**Tabel T-C.32**  
**Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan Tahun 2022 Berdasar OPD**  
**Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut**

Nama SKPD : Kecamatan Wanaraja

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Lokasi (desa)	Volume	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
<b>BIDANG PEMERINTAHAN</b>									
1	Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Pembentukan/Pemekaran Desa	Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemdes	Desa Sukamenak	1 desa	200.000.000	DPMD
2	Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Pembentukan/Pemekaran Desa	Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemdes	Desa Sindanggratu	1 desa	200.000.000	DPMD
<b>BIDANG FISIK</b>									
1	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat-pusat perekonomian	Peningkatan dan rehabilitasi jalan dan jembatan desa	Pembangunan/Rehab Jembatan	Peningkatan akses transportasi ke pusat-pusat perekonomian	Kp. Garawangsa RW 01 Desa Sindangprabu	1 unit	200.000.000	DPMD

2	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman	Peningkatan dan rehabilitasi jalan dan jembatan desa	Pembangunan Rehab Jembatan	Peningkatan akses transportasi ke pusat-pusat perekonomian	Jalan Desa Sindangmekar-Sindangprabu Blok Cimalaka Desa Sindangmekar	1 unit	200.000.000	DPMD
3	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman	Pembangunan Infrastruktur permukiman	Peningkatan Drainase Permukiman untuk Cegah Kumuh	Peningkatan kualitas lingkungan permukiman	Kp. Bayubud RW 04 Desa Sindangmekar	500 m	645.150.000	Disperkim
4	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman	Pembangunan Infrastruktur permukiman	Pembangunan Drainase Permukiman untuk Cegah Kumuh	Peningkatan kualitas lingkungan permukiman	Dusun I, II, III, IV Desa Sukamenak	2.000 m	2.580.600.000	Disperkim
5	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	Meningkatnya pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir	Pengendalian banjir	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Peningkatan kualitas saluran air	RW 05 Desa Wanasari	1.500 m	242.187.000	Dinas PUPR
6	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman	Pembangunan Infrastruktur permukiman	Pembangunan Tembok Penahan Tanah Permukiman untuk Hunian Kawasan Strategis	Peningkatan kualitas lingkungan permukiman	Kp. Sindangsari RT 01 RW 02 Desa Cinunuk	339 m	695.085.600	Disperkim
7	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman	Pembangunan Infrastruktur permukiman	Pembangunan Drainase Permukiman untuk Cegah Kumuh	Peningkatan kualitas lingkungan permukiman	Dusun I, II, dan III Desa Wanajaya	1.130 m	814.040.700	Disperkim

8	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman	Pembangunan Infrastruktur permukiman	Peningkatan Drainase Permukiman untuk Cegah Kumuh	Peningkatan kualitas lingkungan permukiman	Kp. Garawangsa, Kp. Cowal Desa Sindangprabu	1.130 m	912.237.700	Disperkim
9	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman	Pembangunan jalan dan jembatan	Pembangunan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Peningkatan kualitas lingkungan permukiman	Desa Cinunuk	695 m	155.000.000	Dinas PUPR
10	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	Meningkatnya pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir	Pengendalian banjir	Pembangunan Sistem drainase Lingkungan	Peningkatan kualitas saluran air	RW 02 RW 06 Desa Wanasari	400 m	399.520.000	Dinas PUPR
11	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	Meningkatnya pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir	Pengendalian banjir	Pembangunan Sistem drainase Lingkungan	Peningkatan kualitas saluran air	Dusun I s.d Dusun III desa Wanamekar	613 m	494.868.770	Dinas PUPR
<b>BIDANG EKONOMI</b>									
1	Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal	Pemberdayaan sosial	Pelatihan Pemberdayaan Wanita Rawn Sosial Ekonomi	Optimalisasi bantuan usaha mikro dan industri kecil	Dusun I, II dan III Desa Wanajaya	1 kelompok	20.000.000	Dinsos

2	Penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja pariwisata dan jasa produktif lainnya	Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal	Peningkatan kesempatan kerja	Pemberian Kerja Sementara Sistem Padat Karya (PKS-PK) (HOK)	Peningkatan pendapatan masyarakat terdampak ekonomi	Desa Wanaraja	1 kelompok	65.000.000	Disnakertrans
3	Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Penataan kawasan permukiman perdesaan	Pengadaan Kendaraan Angkutan Sampah Roda 3	Peningkatan pengelolaan sampah	Susun I s.d III Desa Wanamekar	10 unit	529.465.200	Dinas LH
4	Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal	Program pengembangan IKM (Agro/Non Agro)	Bantuan Mesin IKM (Agro/Non Agro) Mesin Konveksi	Optimalisasi bantuan usaha mikro dan industri kecil	Desa Sindangprabu	18 kelompok	108.000.000	Disperindag ESDM
<b>BIDANG SOSIAL BUDAYA</b>									
1	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga	Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk	Keluarga Berencana	Kinerja Kampung KB (Persentase CU/PUS)	Peningkatan akses pelayanan KB	RW 05 Desa Sindangmekar	20 OK		Dinas PPKBPP-PA

2	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender hak anak serta pemuda dan olah raga	Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk	Keluarga Berencana	Kinerja Kampung KB (Persentase CU/PUS)	Peningkatan akses pelayanan KB	Desa Sukamenak	20 OH		Dinas PPKBPP-PA
3	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender hak anak serta pemuda dan olah raga	Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk	Keluarga Berencana	Kinerja Kampung KB (Persentase CU/PUS)	Peningkatan akses pelayanan KB	RW 03 Dusun II Desa Wanajaya	1 paket		Dinas PPKBPP-PA
4	Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Meningkatnya pengamalan nilai keagamaan dan budaya daerah	Program Peningkatan Pendidikan Agama	Bantuan Guru Ngaji	Peningkatan kualitas pendidikan keagamaan	Desa Sindanggratu	10 orang	10.000.000	Setda

5	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender hak anak serta pemuda dan olah raga	Meningkatnya harapan hidup masyarakat	Perbaikan gizi masyarakat	Penyediaan Suplai Makanan Bergizi Pencegahan Stunting	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas kesehatan	Dusun I, II, III, IV Desa Sukamenak	1 OH	600.000	Dinkes
6	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender hak anak serta pemuda dan olah raga	Meningkatnya harapan hidup masyarakat	Upaya kesehatan masyarakat	Peralatan Posyandu (Paket)	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan	Desa Wanasari	1 paket	6.650.000	Dinkes
7	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender hak anak serta pemuda dan olah raga	Meningkatnya harapan hidup masyarakat	Upaya kesehatan masyarakat	Pembangunan Gedung Posyandu	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan	Dusun II dan III Desa Wanajaya	1 unit	50.000.000	DPMD

8	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender hak anak serta pemuda dan olah raga	Meningkatnya harapan hidup masyarakat	Upaya kesehatan masyarakat	Peralatan Posyandu (Paket)	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan	Dusun I, II dan III Desa Wanajaya	3 paket	19.950.000	Dinkes
9	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender hak anak serta pemuda dan olah raga	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	Peningkatan akses, sarana dan prasarana pendidikan kesetaraan	Rehabilitasi Jamban - SD	Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas	SDN Wanajaya 1 Desa Wanajaya	28 m2	43.680.000	Disdik
<b>Jumlah</b>								<b>8.592.034.970</b>	

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Nasional**

Sebagai suatu keharusan setiap Perangkat Daerah untuk menetapkan tujuan sasaran dan program kegiatan dalam rangka dapat diukur kinerja daripada setiap Perangkat Daerah termasuk untuk dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah baik Tingkat Kota, Provinsi maupun Kebijakan Nasional, maka Program Prioritas Pembangunan Kecamatan Wanaraja guna menunjang Pembangunan Kabupaten Garut secara keseluruhan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang (sementara) adalah sebagai berikut :

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Penanggulangan Kemiskinan
5. Ketahanan Pangan
6. Infrastruktur
7. Iklim Investasi dan iklim usaha
8. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana
9. Kebudayaan
10. Kreativitas dan inovasi
11. Politik, hukum dan kemandirian serta ketertiban
12. Perekonomian
13. Kesejahteraan rakyat

Keseluruhan prioritas pembangunan tersebut tentunya untuk dapat dipergunakan mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Garut sesuai dengan visi yang akan ditetapkan nantinya

Sesuai dengan ruang lingkup tugas dan beban kerja tersebut diatas, maka Kecamatan Wanaraja di dalam menentukan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya



sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan sasaran pembangunan daerah. Melalui tugas dan fungsi yang dilaksanakan di Kecamatan Wanaraja yang meliputi hampir semua prioritas pembangunan, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Wanaraja telah sejalan dengan prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah.

### **3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Garut 2019-2024 maka Kecamatan Wanaraja mempunyai **tujuan** : *“Mewujudkan pelayanan publik kecamatan yang profesional dan amanah”*

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan, sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Adapun sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Wanaraja Tahun 2022 adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan;
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan;
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan;
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan.

Indikator sasaran merupakan ukuran keberhasilan, prestasi (performance) sehingga kalau tercapai dapat menjadi kebanggaan tersendiri dan apabila belum tercapai dapat dijadikan pembelajaran untuk memacu meraih prestasi dimasa mendatang. Adapun indikator sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Wanaraja Tahun 2022 adalah :

1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
2. Nilai Sinergitas Kerja Kecamatan;
3. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan;
4. Nilai/ Predikat SAKIP.

Untuk lebih jelasnya, tujuan, sasaran dan indikator sasaran Kinerja Kecamatan Wanaraja Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.1**  
**Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Kinerja Kecamatan Wanaraja Tahun 2022**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan	Nilai SKM Kecamatan Wanaraja	90
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	90
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	90 %
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai/ Predikat SAKIP Kecamatan Wanaraja	CC

### 3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka

kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu

Kecamatan Wanaraja merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) Kecamatan di Kabupaten Garut sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Wanaraja sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Camat mempunyai fungsi ; Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan Kelurahan/Desa; Pembinaan ketentraman dan ketertiban; Pembinaan pemberdayaan masyarakat; Pembinaan kesejahteraan rakyat; Pembinaan pelayanan umum.

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan Kegiatan.

- Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Wanaraja diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Garut terpilih. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Wanaraja merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati terpilih.

- Pencapaian MDG's

Millinium Development Goals merupakan kesepakatan dari negara-negara didunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia, khususnya masyarakat dunia ke tiga yang kondisi ekonominya masih dibawah standar, dililit kemiskinan dan masih mengalami gejolak politik sehingga sulit membangun dirinya. Kesepakatan antar negara ini dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara-negara yang ikut menanda tangani MDGs, seperti pengentasan kemiskinan sampai 50%, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan pendidikan masyarakat dan sebagainya. Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut

menanda tangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target MGDs. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target MDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Kecamatan Wanaraja diimplementasikan untuk mencapai target-target MDGs itu dalam lingkup Kecamatan.

#### - Pengentasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius

Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Garut. Demikian pula halnya dengan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Wanaraja. Program dan kegiatan yang dirancang pada tahun 2020 yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

#### - Pencapaian SPM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukurang yang harus dipenuhi agar dapat

menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar.

Sesuai dengan PP Nomor 65 tahun 2005 Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Wanaraja diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Penyelenggaraan PATEN.

#### - Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Kecamatan Wanaraja sebagai sebuah Kecamatan di Kabupaten Garut memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Garut. Potensi itu terutama terkait dengan industri kecil dibidang kerajinan seperti kerajinan sepatu, karet spare part, ranginang (makanan khas sunda), ikan bandeng, kere mujaer, dodol garut, tempe, tahu, macaroni dan sejenis makanan ringan khas sun-

da lainnya serta obyek-obyek pariwisata terutama wisata domba.

Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Wanaraja melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini.

b. Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan

1. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan

Jumlah program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kecamatan Wanaraja Tahun 2022 adalah 6 (enam) Program dan 13 (tiga belas) kegiatan

2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Wanaraja sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Wanaraja dan mencakup semua Desa/Kelurahan

3. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan sebesar Rp. 3.294.071.452,-

Adapun Program Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah

ditetapkan. Adapun Kegiatan Kecamatan Wanaraja pada Tahun 2022 adalah :

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;**

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- 4) Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

**2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;**

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
- 2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;

**3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;**

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
- 2) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

**4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;**

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;

**5. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum;**

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah;

## **6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa;**

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa;

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table T-C.33 berikut ini :



**Tabel T-C.33.**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023**  
**Kabupaten Garut**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Wanaraja

lembar 1 dari 7

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	Unsur Kewilayahan								
7.01	Kecamatan Wnaraja								
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah daerah di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Wanaraja	100 %	2.451.169.552	DAU		100 %	5.388.156.611
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah daerah di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Wanaraja	100 %	16.500.000	DAU		100 %	18.150.000
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah daerah di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Wanaraja	1 dokumen	16.500.000	DAU		1 dokumen	18.150.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah dae-	Kecamatan Wanaraja	100 %	1.916.040.190	DAU		100 %	2.017.622.211

		<b>rah di Tingkat Kecamatan</b>							
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase Penyelesaian Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Tetap Waktu	Kecamatan Wanaraja	14 bulan	1.908.890.190	DAU		14 bulan	2.009.767.211
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Prosentase Penyelesaian Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Tetap Waktu	Kecamatan Wanaraja	12 Bulan	7.150.000	DAU		12 Bulan	7.865.000
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah daerah di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Kecamatan Wanaraja</b>	<b>100 %</b>	<b>190.940.000</b>	<b>DAU</b>		<b>100 %</b>	<b>1.543.103.017</b>
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase penyelesain dokumen administrasi keuangan dan asset tetetap waktu	Kecamatan Wanaraja	12 bulan	18.139.000	DAU		12 bulan	199.529.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase penyelesain dokumen administrasi keuangan dan asset tetetap waktu	Kecamatan Wanaraja	12 bulan	60.000.000	DAU		12 bulan	1.178.074.089
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Prosentase penyelesain dokumen administrasi keuangan dan asset tetetap waktu	Kecamatan Wanaraja	12 bulan	7.890.000	DAU		12 bulan	7.798.208
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prosentase penyelesain dokumen administrasi keuangan dan asset tetetap waktu	Kecamatan Wanaraja	12 bulan	15.141.800	DAU		12 bulan	20.372.770
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Prosentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah daerah di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Wanaraja	5 Jenis	61.600.000	DAU		5 Jenis	89.540.000

7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prosentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan dan aset tetap waktu	Kecamatan Wanaraja	12 Bulan	28.970.000	DAU		12 Bulan	47.788.950
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Prosentase aset dalam kondisi baik</b>	<b>Kecamatan Wanaraja</b>	<b>90 %</b>	<b>127.394.400</b>	<b>DAU</b>		<b>90 %</b>	<b>483.574.586</b>
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prosentase aset dalam kondisi baik	Kecamatan Wanaraja	5 unit	112.078.000	DAU		5 unit	459.987.330
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Prosentase aset dalam kondisi baik	Kecamatan Wanaraja	5 jenis	15.316.400	DAU		5 jenis	23.587.256
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kantor</b>	<b>Kecamatan Wanaraja</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>50.582.812</b>	<b>DAU</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>359.417.481</b>
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kantor	Kecamatan Wanaraja	12 Bulan	16.334.412	DAU		12 Bulan	179.712.979
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kantor	Kecamatan Wanaraja	12 Bulan	14.330.000	DAU		12 Bulan	157.784.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kantor	Kecamatan Wanaraja	12 Bulan	19.918.400	DAU		12 Bulan	21.920.602
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Prosentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah daerah di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Kecamatan Wanaraja</b>	<b>75 %</b>	<b>149.712.150</b>	<b>DAU</b>		<b>75 %</b>	<b>164.860.311</b>
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prosentase Aset dalam kondisi baik	Kecamatan Wanaraja	12 Bulan	20.738.500	DAU		12 Bulan	22.988.911
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Ken-	Prosentase Aset dalam kondisi baik	Kecamatan Wanaraja	12 Bulan	28.973.650	DAU		12 Bulan	31.871.400

	daraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Prosentase Asset dalam kondisi baik	Kecamatan Wanaraja	I unit	100.000.000	DAU		I unit	110.000.000
<b>7.01.02</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>	<b>Prosentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Dilaksanakan oleh Kecamatan</b>	<b>Kecamatan Wanaraja</b>		<b>344.211.400</b>	<b>DAU</b>		<b>100 %</b>	<b>219.147.984</b>
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Dilaksanakan oleh Kecamatan	Kecamatan Wanaraja	100 %	170.000.000	DAU		100 %	21.465.444
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Dilaksanakan oleh Kecamatan	Kecamatan Wanaraja	12 bulan	170.000.000	DAU		12 bulan	21.465.444
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat daerah Yang Ada Di Kecamatan	Prosentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Dilaksanakan oleh Kecamatan	Kecamatan Wanaraja	100 %	174.211.400	DAU		100 %	197.682.540
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Prosentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Wanaraja	12 Bulan	174.211.400	DAU		100 %	197.682.540

		Yang Dilaksanakan oleh Kecamatan							
<b>7.01.03</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</b>	<b>Prosentase Masyarakat Desa/ Kelurahan Yang Dapat Diberdayakan</b>	<b>Kecamatan Wanaraja</b>	<b>80 %</b>	<b>26.380.000</b>	<b>DAU</b>		<b>80 %</b>	<b>58,523.828</b>
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Prosentase Masyarakat Desa/ Kelurahan Yang Dapat Diberdayakan</b>	<b>Kecamatan Wanaraja</b>	<b>80 %</b>	<b>10.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>80 %</b>	<b>40.505.476</b>
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Prosentase Masyarakat Desa/ Kelurahan Yang Dapat Diberdayakan	Kecamatan Wanaraja	1 dokumen	10.000.000	DAU		1 dokumen	40.505.476
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Prosentase Masyarakat Desa/ Kelurahan Yang Dapat Diberdayakan</b>	<b>Kecamatan Wanaraja</b>	<b>80 %</b>	<b>16.380.000</b>	<b>DAU</b>		<b>80 %</b>	<b>18.018.352</b>
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Prosentase Masyarakat Desa/ Kelurahan Yang Dapat Diberdayakan	Kecamatan Wanaraja	12 bulan	16.380.000	DAU		12 bulan	18.018.352
<b>7.01.04</b>	<b>Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum</b>	<b>Prosentase Penanganan Gangguan Trantibum</b>	<b>Kecamatan Wanaraja</b>	<b>80 %</b>	<b>127.170.000</b>	<b>DAU</b>		<b>80 %</b>	<b>146.602.753</b>
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Prosentase Penanganan Gangguan Trantibum</b>	Kecamatan Wanaraja	<b>80 %</b>	<b>127.170.000</b>	<b>DAU</b>		<b>80 %</b>	<b>146.602.753</b>
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Prosentase Penanganan Gangguan Trantibum	Kecamatan Wanaraja	12 Bulan	72.129.900	DAU		80 %	86.058.588
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Prosentase Penanganan Gangguan Trantibum	Kecamatan Wanaraja	12 Bulan	55.040.100	DAU		100 %	60.500.000

7.01.05	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilimpahkan Kepada Camat</b>	<b>Kecamatan Wanaraja</b>	80 %	25.000.000	DAU		80 %	450.000.000
7.01.05.2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilimpahkan Kepada Camat</b>	<b>Kecamatan Wanaraja</b>	80 %	270.000.000	DAU		80 %	297.000.000
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Kecamatan Wanaraja	3Kali Kegiatan	50.000.000	DAU		3Kali Kegiatan	55.000.000
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Kecamatan Wanaraja	12 Bulan	220.000.000	DAU		12 Bulan	242.000.000
7.01.06	<b>Program Pembinaan Dan Pengawasan Desa</b>	<b>Prosentase Desa Berkinerja Baik</b>	<b>Kecamatan Wanaraja</b>	85 %	75.140.000	DAU		85 %	80.154.400
7.01.06.2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Prosentase Desa Berkinerja Baik</b>	<b>Kecamatan Wanaraja</b>	85 %	75.140.000	DAU		85 %	80.154.400
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Kecamatan Wanaraja	36 Kali	25.140.400	DAU		36 Kali	27.654.440
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		Kecamatan Wanaraja	1 Tahun	25.000.000	DAU		1 Tahun	27.500.000
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		Kecamatan Wanaraja	1 Dokumen	25.000.000	DAU		1 Dokumen	25.000.000
<b>JUMLAH</b>					<b>3.294.071.452</b>				<b>5.388.156.611</b>

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN WANARAJA

Rencana Kerja Kecamatan Wanaraja tergambar di dalam Program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra Tahun 2019-2024.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Rencana Strategis Kecamatan Wanaraja Tahun 2019-2024 adalah mencerminkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 serta program prioritas yang menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan yang disesuaikan dengan kondisi daerah dan kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan DPA ( Dokumen Pelaksanaan Anggaran ) SKPD Kecamatan Wanaraja mempunyai program dan kegiatan yang didukung oleh pagu indikatif dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan publik Kecamatan Wanaraja, untuk Tahun 2022 pagu anggaran sebesar Rp. 3.294.071.452,00 dengan rincian sebagai berikut :

- |  |                  |                            |                          |
|--|------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>1. PROGRAM</b>  | <b>PENUNJANG</b> | <b>URUSAN</b>              | <b>Rp. 2.451,169.552</b> |
| <b>PEMERINTAHAN</b>  | <b>DAERAH</b>    | <b>KABUPATEN/<br/>KOTA</b> |                          |
| 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                  |                            | <b>Rp. 16.500.000</b>    |
| • Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |                  |                            | Rp. 16.500.000           |
| 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                          |                  |                            | <b>Rp. 1.916.040.190</b> |

• Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.	1.908.890.190
• Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp.	7.150.000
3) Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	<b>190.940.000</b>
• Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.	18.139.000
• Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.	60.000.000
• Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp.	7.089.200
• Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.	15.141.800
• Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp.	61.600.000
• Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.	28.970.000
4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	Rp.	<b>127.394.400</b>
• Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.	112.078.000
• Pengadaan Mebel	Rp.	15.316.400
5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemerintah Daerah	Rp.	<b>50.582.812</b>
• Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.	14.806.500
• Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.	14.330.000



• Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.	19.918.400
6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penun- jang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	<b>149.712.150</b>
• Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Pero- rangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jab- atan	Rp.	20.738.500
• Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Ken- daraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.	28.973.650
• Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.	100.000.000
<b>2. PROGRAM</b>	<b>PENYELENGGARAAN</b>	<b>Rp. 344.211.400</b>
<b>PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		
1) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp.	<b>170.000.000</b>
• Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerinta- han di Tingkat Kecamatan	Rp.	170.000.000
2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Rp.	<b>174.211.400</b>
• Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Rp.	174.211.400
<b>3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>Rp.</b>	<b>26.380.100</b>
<b>DESA DAN KELURAHAN</b>		
1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp.	<b>10.000.000</b>
• Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam	Rp.	10.000.000

Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
2) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp.	<b>16.380.100</b>
• Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Rp.	16.380.100
<b>4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Rp.</b>	<b>127.170.000</b>
1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp.	<b>127.170.000</b>
• Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp.	71.129.900
• Harmonisasi Hubungan Dengan Tokok Agama dan Tokoh Masyarakat	Rp.	55.040.100
<b>5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Rp.</b>	<b>270.000.000</b>
1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp.	<b>270.000.000</b>
• Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Rp.	50.000.000
• Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Rp.	220.000.000
<b>6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Rp.</b>	<b>75.140.400</b>
1) Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pem-	Rp.	<b>75.140.400</b>

## binaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Rp. 25.140.400
- Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Rp. 25.000.000
- Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Pem- Rp. 25.000.000

**JUMLAH Rp. 3.294.071.452**

Program dan kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi, tujuan dan sasaran Kecamatan Wanaraja. Dengan dukungan dana yang tersedia diharapkan pelayanan publik yang diselenggarakan akan semakin baik dan semakin berkualitas serta berpengaruh positif pada peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ).

## **BAB V**

## P E N U T U P

Pada dasarnya seluruh program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Wanaraja dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya Visi Kabupaten Garut di Kecamatan Wanaraja

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Wanaraja. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Wanaraja ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Garut secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Mengkomunikasikan/sosialisasi rencana Kinerja ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi *seluruh* pihak untuk melaksanakan rencana kerja yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renja yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang

dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;

4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga Rencana Kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu **Visi Terwujudnya Kabupaten Garut yang Bertaqwa, Maju, dan Sejahtera.**

**BUPATI GARUT,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**